

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa merupakan entitas dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat. Perlunya melaksanakan pembangunan di desa untuk dapat memperlancar pemenuhan kebutuhan publik dalam pelayanan. Pentingnya dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa maju dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang selama ini terkesan memprihatinkan. Kebijakan pemerintah tentang program pengembangan desa maju dan mandiri sangatlah baik dan mendapat dukungan. Salah satu konsep membangun desa maju dan mandiri adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam Undang-Undang Desa ini, pemerintah ingin memberikan tempat yang memadai dan leluasa untuk desa dapat berkembang dengan sistem demokrasi agar desa dapat meningkatkan kesejahteraannya, agar terciptanya pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Undang-Undang Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Desa di sini dijelaskan, “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Undang-Undang Desa menyebut dengan jelas tentang pengertian desa, prinsip dan tujuan pembangunan desa yang

mengedepankan posisi desa dengan kewenangannya berdasar hukum. Maka diperlukannya pembenahan dalam upaya peningkatan Desa karena hingga saat ini desa di pelosok masih ada desa-desa yang tertinggal.

Kabupaten Jember sendiri salah satu kabupaten yang penduduknya cukup padat di Jawa Timur dimana Kabupaten Jember memiliki 2.858.142 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 248 Kelurahan/Desa. Dari 248 desa tentunya saat ini tidak semua desa mandiri atau maju terutama didaerah-daerah pelosok. Sampai saat ini dari data kondisi desa-desa di Kabupaten Jember hanya ada satu desa yang masih sangat tertinggal, 46 desa tertinggal, 114 desa berkembang dan 60 desa maju data terakhir yang disahkan oleh kementerian desa. Upaya pemerintah Kabupaten Jember saat ini dibantu dengan adanya pendamping desa untuk meningkatkan status desa-desa di Kabupaten Jember melalui pembangunan desa maupun pemberdayaan desa.

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui pembangunan desa diharapkan masyarakat desa memiliki jaminan hidup yang sejahtera dalam pedesaan. Tidak hanya melalui pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tetapi melalui pemberdayaan masyarakat Desa juga yang artinya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Seperti halnya Desa Puger Kulon yang berstatus desa mandiri dan Desa Puger Wetan yang berstatus desa maju saat ini, yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh apa yang telah terjadi dan bagaimana sesungguhnya penerapan program pengembangan desa maju dan mandiri di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian terdahulu juga (Budi Harjo, 2017) Mengenai Membangun Desa mengemukakan bahwa perlu satu upaya untuk mendorong agar desa-desa

kita dapat lebih berkembang, maju dan mandiri. Yakni diidentifikasi permasalahan yang ada di desa, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian menurut beliau : 1. Masalah kelembagaan desa, 2. Masalah pemberdayaan masyarakat, 3. Masalah teknologi tepat guna.

Oleh karena itu penelitian peneliti kali ini merumuskan tentang bagaimana penerapan/pengimplementasian program pengembangan dalam desa maju dan mandiri khususnya di daerah Kabupaten Jember.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Implementasi Program Pengembangan Desa Maju Dan Mandiri (P2DM2) Di Kabupaten Jember”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi program pengembangan desa maju dan mandiri (P2DM2) di Kabupaten Jember?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang program pengembangan desa maju dan mandiri yang ada di Kabupaten Jember

2. Secara Khusus

Untuk mengetahui perkembangan program pengembangan desa maju dan mandiri terutama di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi dalam Ilmu pemerintahan, bidang Pemerintahan Desa kebijakan program Desa Maju Dan Mandiri, khususnya dalam meningkatkan

status desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM), baik untuk kepentingan kemandirian maupun kerjasama, dan faktor-faktor yang menghambat peningkatan desa. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sangatlah diperlukan karena meningkatnya suatu desa berpengaruh pula pada meningkatnya kualitas pemerintahan Kabupaten tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah Kabupaten Jember, Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember mengenai Program Pengembangan Desa Maju Dan Mandiri. Secara rinci, umpan balik implementasi ini meliputi :

1. Hasil implementasi pengembangan Desa Maju Dan Mandiri yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember
2. Hasil implementasi pengembangan Desa Maju Dan Mandiri yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
3. Saran penyempurnaan pengembangan Desa Maju Dan Mandiri pemerintah Kabupaten Jember kedepan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember
4. Saran penyempurnaan kebijakan tentang pengembangan Desa Maju Dan Mandiri

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dibidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.